

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2023

<https://binjaikota.bps.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2023

ISBN:

No. Publikasi: 12760.2322

Katalog: 4102004.1276

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 68 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2023

Penanggung Jawab Umum

Ir. Gloria Ebenhaezer, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Suharwanto, SE, M.Si

Editor

Suharwanto, SE, M.Si

Penulis

Herlena Simamora, SST

Tata Letak

Herlena Simamora, SST

Infografis

Herlena Simamora, SST

Cover

Herlena Simamora, SST

KATA PENGANTAR

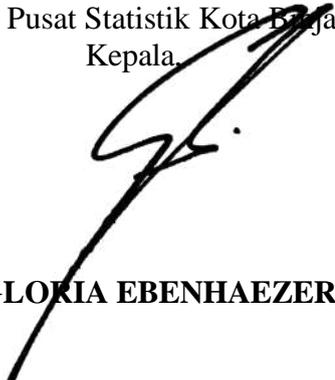
Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di bulan Desember ini Badan Pusat Statistik Kota Binjai telah berhasil menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Binjai Tahun 2023.

Publikasi ini memuat penjelasan dan gambaran mengenai unsur-unsur penyusun kesejahteraan rakyat, meliputi aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, konsumsi dan pengeluaran penduduk perkapita/bulan yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta beberapa konsep definisi indikator kesejahteraan rakyat.

BPS sebagai penyedia data statistik dasar termasuk data statistik kesejahteraan rakyat berharap agar publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen data baik individu, perusahaan maupun instansi/lembaga yang membutuhkan serta diharapkan pula dengan terbitnya publikasi ini, segenap masyarakat peka akan fenomena yang terjadi di sekitar melalui kesadaran akan pentingnya meleak data yang berkualitas.

Demikianlah publikasi ini disusun, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyusunan publikasi yang lebih baik ke depannya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan meridhoi usaha ini, sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara

Binjai, Desember 2023
Badan Pusat Statistik Kota Binjai
Kepala.


GLORIA EBENHAEZER

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Kependudukan.....	7
2.2. Kesehatan.....	7
2.3. Pendidikan.....	8
2.4. Ketenagakerjaan.....	9
2.5. Taraf dan Pola Konsumsi.....	10
2.6. Perumahan.....	10
BAB III. KEPENDUDUKAN	13
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	15
3.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan	17
3.3. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	18
3.4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	19
3.5. Usia Perkawinan Pertama.....	20
3.6. Keluarga Berencana.....	22
BAB IV. KESEHATAN	25
4.1. Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>).....	27
4.2. Penolong Kelahiran.....	29
4.3. Umur Harapan Hidup.....	30

BAB V. PENDIDIKAN.....	33
5.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	37
5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	38
5.3 Angka Partisipasi Murni.....	39
BAB VI. KETENAGAKERJAAN.....	41
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	44
6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	45
6.3. Karakteristik Penduduk Bekerja.....	46
6.3.1. Lapangan Pekerjaan.....	46
6.3.2. Status Pekerjaan.....	46
6.3.3. Pendidikan yang Ditamatkan.....	47
BAB VII. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	49
7.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	51
BAB VIII. PERUMAHAN.....	55
8.1. Kondisi Rumah Tinggal.....	57
8.2. Fasilitas Rumah Tinggal.....	61
BAB IX. KEMISKINAN	65
9.1. Perkembangan Penduduk Miskin.....	67

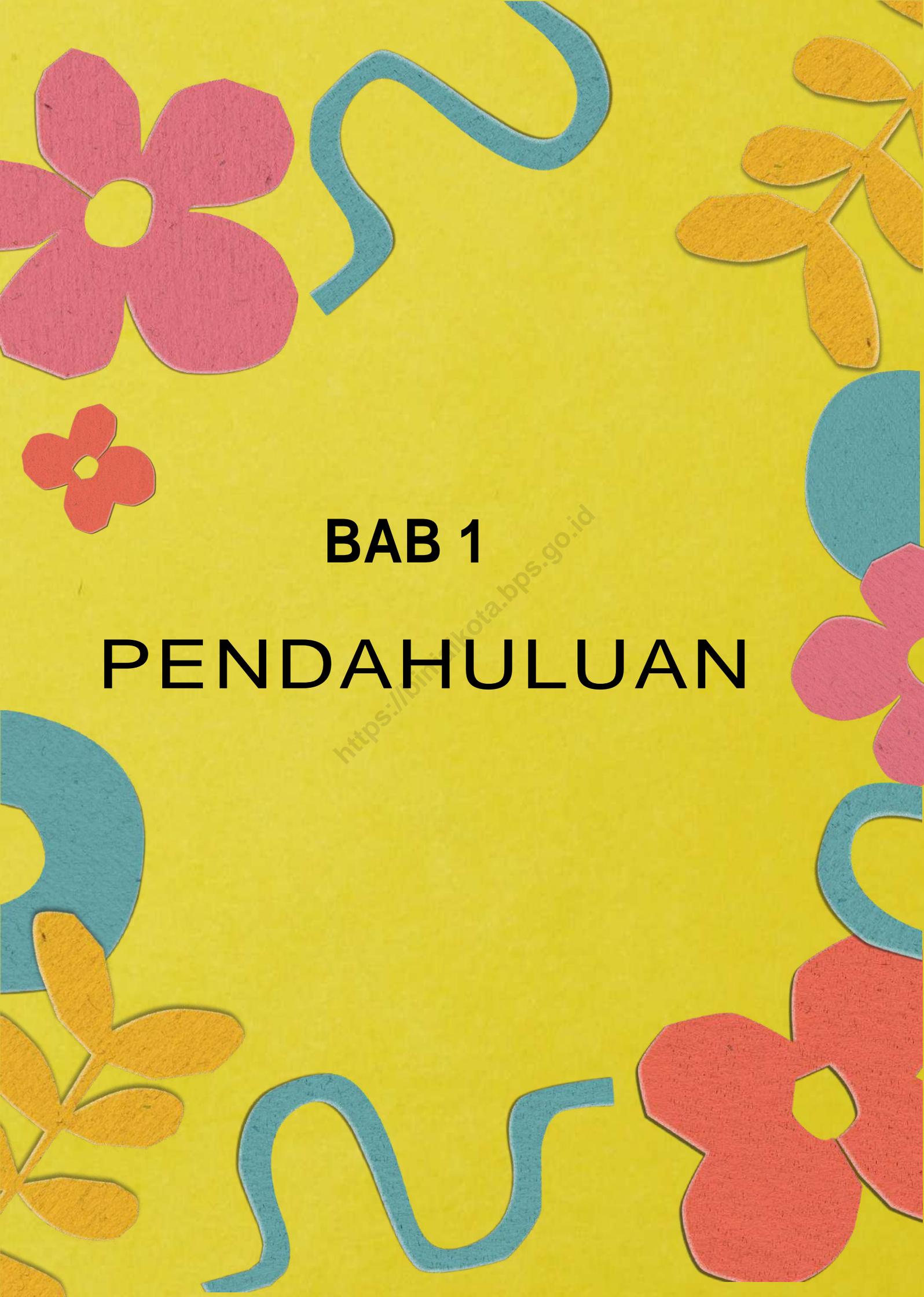
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2020 & 2022.....	17
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur serta Beban Ketergantungan, 2022.....	18
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Binjai menurut Kecamatan, 2022.....	19
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2022.....	20
Tabel 3.5. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022.....	21
Tabel 3.6. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022.....	23
Tabel 3.7. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022.....	23
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Kota Binjai yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2023.....	29
Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Kota Binjai menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2021 & 2022	44
Tabel 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota (%),2021 & 2022.....	45
Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	51

Tabel 7.2.	Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023.....	53
Tabel 8.1.	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	59
Tabel 8.2.	Kondisi Fasilitas Rumah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	61
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Mandi/Cuci/dll di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	62
Tabel 8.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	63
Tabel 9.1.	Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Kota Binjai, 2023.....	68

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai (Persen), 2017-2022.....	16
Grafik 4.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Kota Binjai, 2023.....	28
Grafik 4.2. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2023.....	30
Grafik 4.3. Perkembangan UHH Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022-2023.....	31
Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Binjai, 2023.....	37
Grafik 5.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Binjai, 2023.....	38
Grafik 5.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Binjai, 2023.....	39
Grafik 6.1. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Status Pekerjaan, 2022.....	47
Grafik 6.2. Persentase Penduduk Bekerja Kota Binjai Menurut Pendidikan yang ditamatkan, 2022.....	48
Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Binjai, 2023.....	58
Grafik 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lantai Terluas Terbuat dari Tanah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	60
Grafik 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023.....	63
Grafik 9.1. Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai, 2018-2023.....	68



BAB 1

PENDAHULUAN

<https://umhikota.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

1.2. Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Binjai 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kota Binjai. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan

masukannya terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Binjai 2023. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Binjai, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian indikator kesejahteraan rakyat Kota Binjai 2023 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.



BAB 2
METODOLOGI

<https://www.kota.bps.go.id>

2.1. Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

2.2. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan

petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.

- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.3. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.4. Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi

yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.

Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

<https://binjainkota.bps.go.id>



BAB 3

KEPENDUDUKAN

<https://lib.jaikota.bps.go.id>

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Binjai tercatat sebesar 291.842 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk tercatat 1,13 persen kemudian menurun menjadi 1,09 persen pada tahun 2018. Namun angka laju pertumbuhan

penduduk tersebut pada tahun 2019 turun menjadi 0,98 persen dan meningkat lagi menjadi 1,66 persen pada tahun 2020 dan kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 1,61 persen. Selanjutnya tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Binjai adalah sebesar 1,59 persen (Grafik 3.1). Diproyeksikan pada tahun 2022 jumlah penduduk Binjai berjumlah 300.009 jiwa seperti tercantum pada Tabel 3.1.

Grafik 3.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai (Persen), 2017-2022



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2018-2022

Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2022 mencapai 300.009 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke 2022 sebesar 1,59 persen. Jumlah rumah tangga yang ada di Kota Binjai sebesar 67.777 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4,36 yang berarti secara rata-rata setiap rumah tangga di Binjai mempunyai anggota rumah tangga sekitar 4 orang.

Pada tabel 3.1 terlihat bahwa Kecamatan Binjai Utara merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2022 penduduk Binjai Utara berjumlah 87.297 jiwa dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 orang. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah penduduk cukup besar adalah Kecamatan Binjai Timur yaitu berjumlah 67.505 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Binjai Kota merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni berjumlah 32.435 jiwa.

Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan, 2020 & 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Binjai Selatan	59 132	60 150
Binjai Kota	32 264	32 435
Binjai Timur	66 321	67 505
Binjai Utara	85 829	87 297
Binjai Barat	51 815	52 622
Kota Binjai	295 361	300 009

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

3.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan

Struktur umur penduduk dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu: kelompok umur muda (dibawah 15 tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Pada tahun 2022 sebagian besar penduduk Kota Binjai adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun), karena mencapai 205.419 jiwa atau 68,48 persen, kemudian kelompok anak-anak (0-14 tahun) mencapai 77.657 jiwa atau 25,88 persen dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai 16.933 jiwa atau 5,64 persen.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur serta Beban Ketergantungan, 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 15	40 148	37 509	77 657
15 - 64	102 343	103 076	205 419
65 +	7 541	9 392	16 933
Jumlah	150 032	147 669	300 009
Rasio Angka Beban Ketergantungan			46,05

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa rasio angka beban ketergantungan Kota Binjai tahun 2022 termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 46,05 persen, artinya setiap seratus orang berusia kerja/produktif di Kota Binjai mempunyai tanggungan sebanyak 46 atau 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

3.3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2022 diketahui jumlah penduduk Binjai adalah sebesar 300.009 jiwa yang terdiri dari 150.032 jiwa laki-laki dan perempuan 147.669 jiwa atau dengan sex ratio sebesar 100,04 yang berarti setiap 1000 penduduk perempuan terdapat 1000,4 penduduk laki-laki.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Binjai menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binjai Selatan	30 218	29 932	60 150	100,96
Binjai Kota	16 102	16 333	32 435	98,59
Binjai Timur	33 663	33 842	67 505	99,47
Binjai Utara	43 680	43 617	87 297	100,14
Binjai Barat	26 369	26 253	52 622	100,44
Binjai	150 032	149 977	300 009	100,04

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

3.4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dilihat dari kepadatan penduduk, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Binjai Kota yang mencapai 7.872,57 jiwa per km². Dengan luas

wilayah terkecil di antara kecamatan-kecamatan lainnya yaitu hanya seluas 4,12 km². Kecamatan Binjai Kota merupakan sasaran hunian masyarakat karena merupakan pusat perkotaan di Kota Binjai. Adapun kepadatan penduduk di kecamatan lain adalah Kecamatan Binjai Barat yaitu sebesar 4.845,49 jiwa per km², Kecamatan Binjai Utara yaitu sebesar 3.700,59 jiwa per km², Kecamatan Binjai Timur yaitu sebesar 3.079,61 jiwa per km² dan kepadatan penduduk terendah ada di kecamatan Binjai Selatan yang hanya mencapai 2.007,68 jiwa per km².

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Binjai Selatan	60 150	2 007,68	20,05
Binjai Kota	32 435	7 872,57	10,81
Binjai Timur	67 505	3 079,61	22,50
Binjai Utara	87 297	3 700,59	29,10
Binjai Barat	52 622	4 845,49	17,54
Binjai	300 009	3 316,85	100,00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

3.5. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi.

Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Berdasarkan Tabel 3.5 sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 21+ tahun (62,88 persen) kemudian diikuti usia 19-20 tahun (24,21 persen) dan usia 17-18 tahun (9,86 persen). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masih ada sebanyak 3,04 persen wanita berumur 10 tahun ke Atas yang usia pada perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun dan dinilai masih terlalu muda.

Tabel 3.5. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022

Usia Perkawinan Pertama	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
<=16	5,07	3,04
17 – 18	12,58	9,86
19 – 20	23,52	24,21
21+	58,83	62,88

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Sama dengan Kota Binjai, sebagian besar usia saat perkawinan pertama Provinsi Sumatera Utara adalah 21+ tahun sebesar 58,83 persen, kemudian diikuti usia 19-20 tahun (23,52 persen), usia 17-18 tahun (12,58 persen), dan usia <=16 (5,07 persen). Persentase penduduk wanita kota Binjai yang usia perkawinan pertamanya <=18 tahun sebanyak 12,90 persen, lebih kecil dibanding Provinsi Sumatera Utara (17,65 persen). Padahal usia yang terbaik untuk menikah menurut BKKBN berusia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun laki-laki. Pernikahan dini banyak membawa kerugian bagi wanita, dari sisi psikologis, fisik maupun biologis. Dari sisi psikologis, belum siapnya menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Selain itu, remaja yang menikah dini baik secara fisik

maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi.

3.6. Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 44,00 persen, lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Utara sebesar 40,73 persen. Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut di antaranya menggunakan alat/cara suntikan (35,80 persen), pil KB (31,66 persen), MOW (5,77 persen), MOP (0,43 persen), susuk KB/Implan (14,66 persen), spiral (7,69 persen) dan kondom (3,99 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai dan mudah pemakaiannya.

Tabel 3.6. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022

Status Penggunaan	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
Sedang menggunakan	40,73	44,00
Pernah menggunakan	16,90	16,11
Tidak pernah menggunakan	42,37	39,88
Sumatera Utara	100,00	100,00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022

Tabel 3.7. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022

Status Penggunaan	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
Sterilsasi wanita/tubektomi/MOW	7,09	5,77
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,19	0,43
IUD/AKDR/Spiral	2,92	7,69
Suntikan	40,61	35,80
Susuk KB/Implan	18,11	14,66
PIL KB	22,75	31,66
Kondom pria/karet KB	5,12	3,99
Pantang berkala/kalender	1,64	0,00
Lainnya	1,56	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2022



BAB 4
KESEHATAN

<https://bitaalkota.bps.go.id>

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

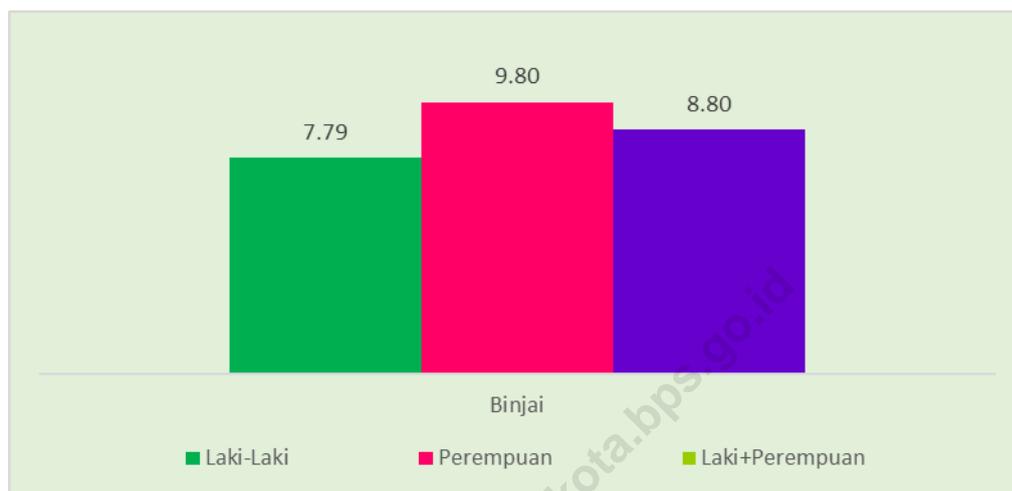
4.1. Angka kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-

harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Tingkat morbiditas laki-laki di Kota Binjai lebih rendah dibanding tingkat morbiditas Kota Binjai sebesar 9,80 persen dan tingkat morbiditas total (laki-laki dan perempuan) yaitu sebesar 8,80 persen.

Grafik 4.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Kota Binjai, 2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 57,07 persen.

Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan kenapa tidak berobat jalan, memang pilihan untuk berobat sendiri berdasarkan pengetahuannya untuk mengobati penyakit merupakan penyebab utama yakni mencapai 77,99 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah merasa tidak perlu.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk di Kota Binjai yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2023

Jenis Kelamin	Persentase yang Berobat Jalan	Alasan Utama tidak Berobat Jalan				
		Tidak punya biaya berobat	Mengobati Sendiri	Merasa tidak perlu	Khawatir terpapar Covid-19	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)	(12)
Laki-laki	56,66	0,00	80,21	15,97	2,29	1,52
Perempuan	57,40	1,43	76,18	18,78	2,41	1,21
Laki-Laki +Perempuan	57,07	0,79	77,99	17,52	2,36	1,35

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

4.2. Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2023 penolong kelahiran balita di Binjai dan provinsi Sumatera Utara pada umumnya adalah tenaga kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhir di Binjai ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sebesar 100 persen dan provinsi Sumatera Utara sebesar 96,62 persen. Tingginya persentase

kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap tenaga kesehatan relatif tinggi.

Grafik 4.2. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2023

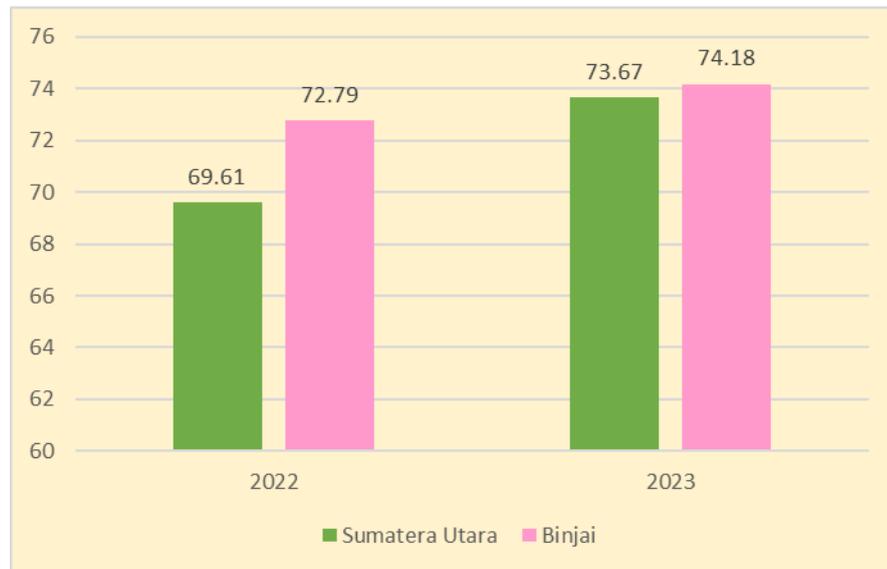


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

4.3. Umur Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 4.3. menunjukkan Perkembangan UHH Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022-2023. UHH Kota Binjai lebih tinggi dari UHH Provinsi Sumatera Utara. Meskipun demikian, UHH Binjai mengalami peningkatan 1,39 point dari 72,79 di Tahun 2022 menjadi 74,18 pada tahun 2023.

Grafik 4.3. Perkembangan UHH Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2022-2023



Sumber : BPS provinsi Sumatera Utara

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.



BAB 5

PENDIDIKAN

<https://bukupajakota.bps.go.id>

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

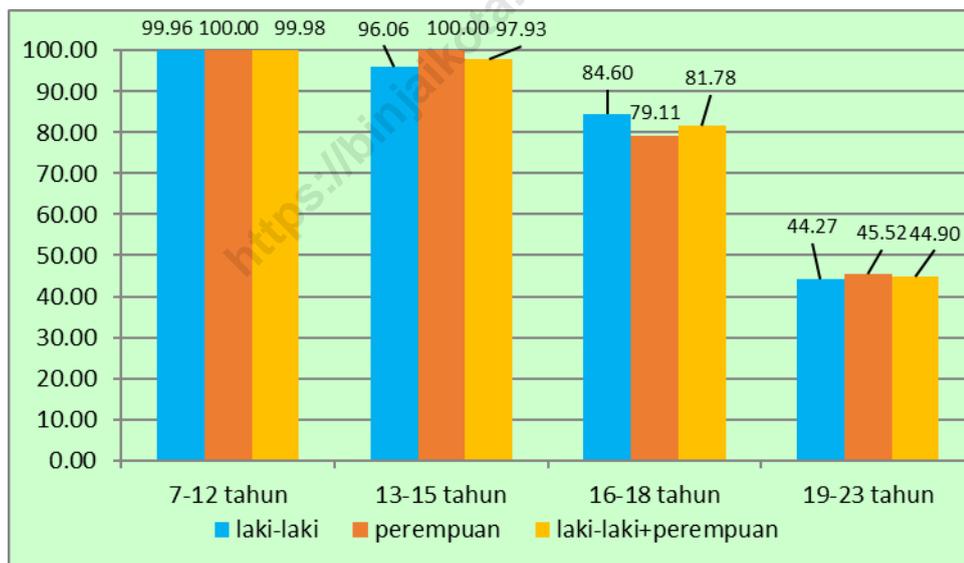
Program atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat

untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun sebagai pendidikan dasar, 13-15 tahun dan 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan 19-23 tahun sebagai perguruan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Binjai, 2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

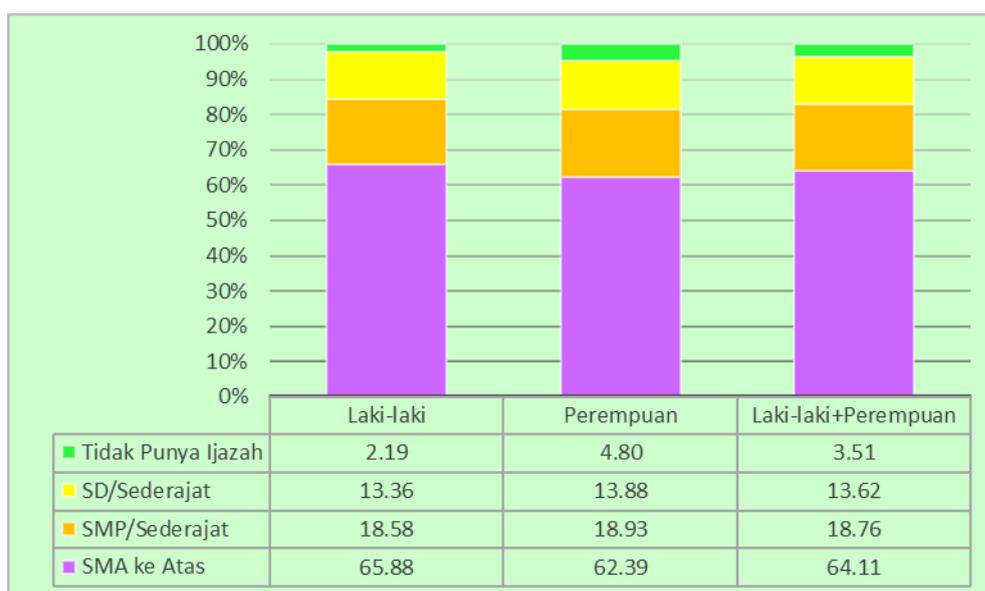
Grafik 5.1. menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Binjai. Pada usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah penduduk (99,98 persen). Pada usia 13-15 tahun angka partisipasi sekolah penduduk (97,93 persen). Pada kelompok umur 16-18 tahun angka partisipasi sekolah penduduk (81,78 persen). Pada kelompok umur 19-23 tahun angka partisipasi sekolah penduduk (44,90).

5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan Grafik 5.2., persentase penduduk laki-laki 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/Sederajat di Kota Binjai pada tahun 2023 adalah sebanyak 65,88 persen lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 62,39 persen. Sebaliknya, persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan SMP/Sederajat (18,58 persen) lebih rendah dibandingkan persentase penduduk perempuan (18,93 persen). Persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan SD/Sederajat (13,36 persen) lebih rendah dibandingkan persentase penduduk perempuan (13,88 persen) dan persentase penduduk laki-laki yang tidak punya ijazah (2,19 persen) lebih rendah dibandingkan persentase penduduk perempuan (4,80 persen).

Grafik 5.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Binjai, 2023

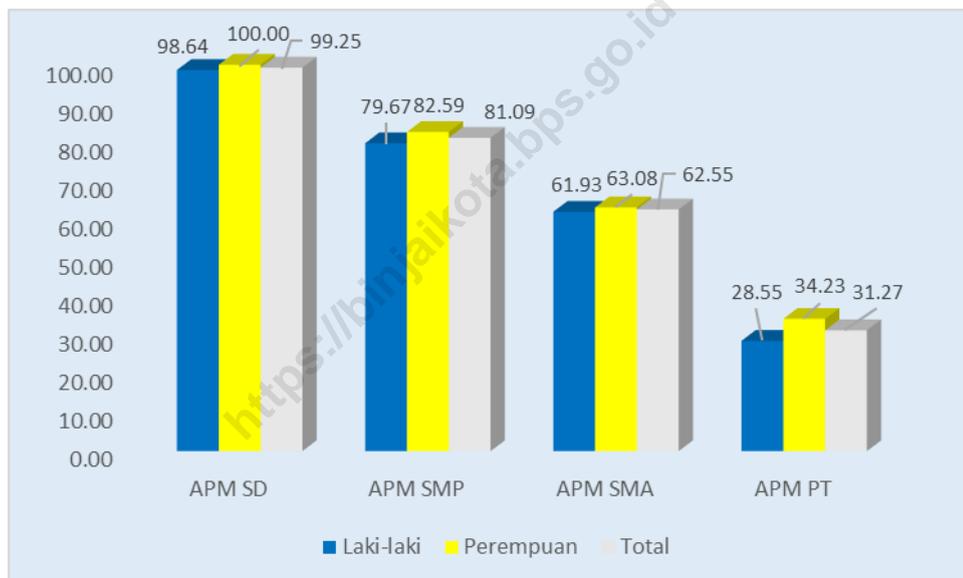


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

5.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Grafik. 5.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Binjai, 2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Tahun 2023, capaian APM SD/Sederajat telah mencapai 99,25 persen. Artinya hampir seluruh anak usia 7-12 bersekolah pada jenjang SD. APM SD/Sederajat laki-laki lebih rendah dibandingkan APM SD/Sederajat perempuan. APM SMP/Sederajat sebesar 81,09 persen memberikan gambaran bahwa hampir seperlima anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP, bisa masih SD, sudah SMA atau sudah putus sekolah. APM SMP/Sederajat laki-laki lebih rendah dibandingkan APM SMP/Sederajat perempuan. Capaian APM SMP pada tahun 2023 masih menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruh anak usia 13-15 tahun.

Sedangkan APM SMA/Sederajat sebesar 62,55 persen. APM SMA/Sederajat laki-laki lebih rendah dibandingkan APM SMA/Sederajat perempuan. APM Perguruan Tinggi sebesar 31,27. APM PT laki-laki lebih rendah dibandingkan APM PT perempuan.

<https://binjainkota.bps.go.id>



BAB 6

KETENAGAKERJAAN

<https://binanggota.bps.go.id>

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2021 & 2022

Kegiatan	2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan kerja	136 357	62,77	129 157	58,61
- Bekerja	125 639	92,14	120 948	93,64
- Pernah Bekerja	4 256	3,12	3 704	2,87
- Tidak Pernah Bekerja	6 462	4,74	4 505	3,49
Bukan Angkatan kerja	80 878	37,23	91 195	41,39
- Sekolah	20 858	25,79	21.810	23,92
- Mengurus Rumah Tangga	49 699	61,45	57 944	63,54
- Lainnya	10 321	12,76	11 441	12,54
Jumlah	217 235	100	220 352	100
T P A K (%)	62,77		59,61	
TPT (%)	7,86		6,36	

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 & 2022

6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja di Binjai adalah 220.352 orang, terdiri dari 129.157 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 91.195 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. TPAK Binjai 2022 adalah sebesar 59,61 persen, artinya bahwa pada tahun 2022 sebanyak 59,61 persen penduduk usia kerja di Binjai siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Pada tahun 2021, TPAK Binjai 62,77 persen, kemudian turun menjadi 59,61 persen pada tahun 2022.

6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 di Binjai sebesar 6,36 persen, menurun dibanding tahun 2021 (7,86 persen).

Tabel 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota (%), 2021 & 2022

Kabupaten/Kota	TPAK		TPT	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
01 Nias	81,79	84,50	3,12	2,81
02 Mandailing Natal	69,79	71,15	6,12	7,64
03 Tapanuli Selatan	74,38	74,53	4,00	3,65
04 Tapanuli Tengah	75,05	76,51	7,24	7,97
05 Tapanuli Utara	82,63	81,07	1,54	1,07
06 Toba Samosir	80,38	79,04	0,83	1,39
07 Labuhanbatu	61,84	63,51	5,66	6,90
08 Asahan	63,02	65,68	6,39	6,26
09 Simalungun	72,55	69,91	4,17	5,51
10 Dairi	85,73	85,01	1,49	0,88
11 Karo	84,56	85,11	1,95	2,71
12 Deli Serdang	66,78	66,84	9,13	8,79
13 Langkat	69,12	71,51	5,12	6,88
14 Nias Selatan	72,25	78,54	3,91	3,69
15 Humbang Hasundutan	84,17	85,83	1,94	...
16 Pakpak Bharat	87,70	86,20	1,36	...
17 Samosir	84,38	83,57	0,70	1,16
18 Serdang Bedagai	66,75	67,59	3,93	4,98
19 Batu Bara	70,00	73,50	6,62	6,21
20 Padang Lawas Utara	76,82	70,33	3,19	4,31
21 Padang Lawas	75,23	75,10	4,07	5,90
22 Labuhanbatu Selatan	66,38	66,76	4,71	3,15
23 Labuhanbatu Utara	65,73	65,31	5,74	3,75
24 Nias Utara	74,27	77,75	3,00	2,59
25 Nias Barat	82,08	84,63	0,74	...
Kota				
71 Sibolga	71,19	65,85	8,72	7,05
72 Tanjungbalai	66,57	70,77	6,59	4,62
73 Pematangsiantar	68,80	65,27	11,00	9,36
74 Tebing Tinggi	67,19	77,26	8,37	6,39
75 Medan	62,16	62,23	10,81	8,89
76 Binjai	62,77	58,61	7,86	6,36
77 Padangsidempuan	68,69	64,41	7,18	7,76
78 Gunungsitoli	62,95	66,11	4,80	3,65
Sumatera Utara	69,10	69,53	6,33	6,16

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 & 2022

Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT menurut kabupaten/kota, daerah kota umumnya memiliki TPT relatif tinggi dan umumnya diatas atau mendekati 10 persen, sebaliknya di daerah kabupaten umumnya rendah. TPT tertinggi terdapat di Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 9,36 persen dan yang terendah adalah TPT Kabupaten Dairi sebesar 0,88 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa di kabupaten pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di kota dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

6.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

6.3.1. Lapangan Pekerjaan

Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan/hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan kemudian pertambangan dan penggalian dan yang terakhir listrik, gas dan air dan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Binjai. Pada tahun 2022 sebanyak 63,44 persen penduduk Binjai berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan/hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian sebesar 33,67 persen, dan yang ketiga sektor listrik, gas dan air sebesar 2,89 persen.

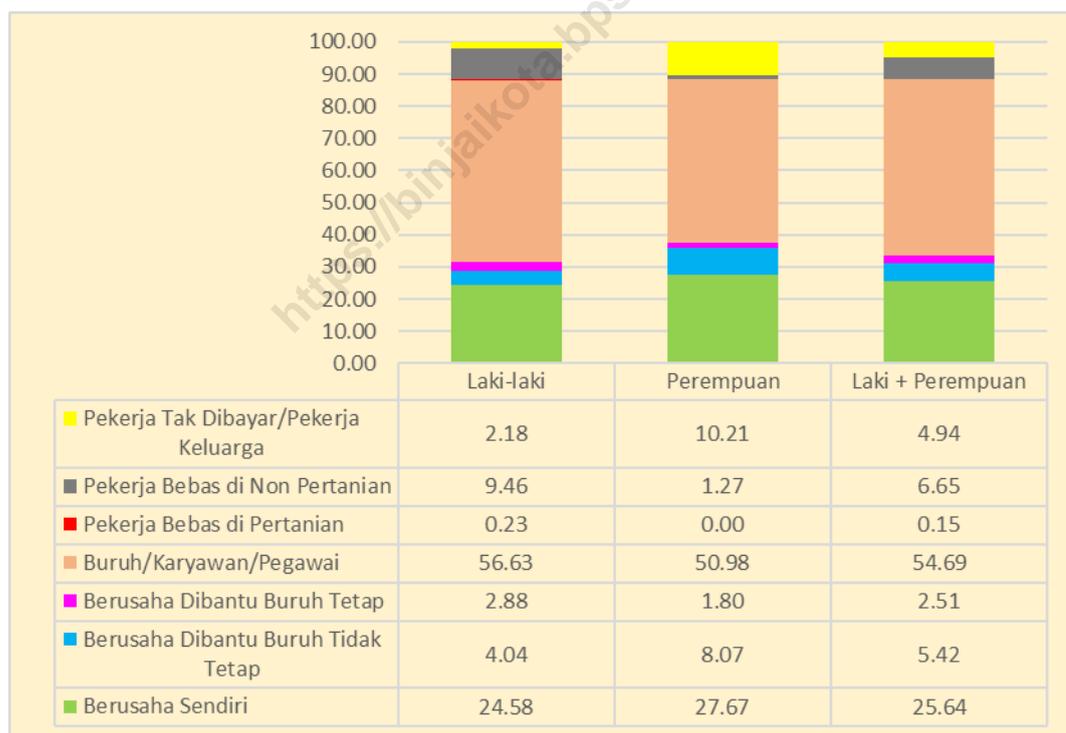
6.3.2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif *'tradisional'*. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Pada umumnya penduduk Kota Binjai bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Grafik 6.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 54,69 persen pekerja di Kota Binjai berstatus buruh/karyawan, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri (25,64 persen). Jika dilihat menurut gender, persentase penduduk laki-laki yang menjadi pekerja keluarga sangat sedikit yaitu hanya 2,18 persen sementara persentase penduduk perempuan yang menjadi pekerja keluarga cukup tinggi yaitu 10,21 persen.

Grafik 6.1. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Status Pekerjaan, 2022



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

6.3.3. Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja profesional atau

pekerja kasar. Seorang pekerja dikatakan sebagai pekerja profesional (white collar worker) bila suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan. Sebaliknya dikatakan pekerja kasar (*blue collar worker*) bila suatu pekerjaan hanya memerlukan tenaga atau ketrampilan tertentu.

Grafik 6.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penduduk bekerja di Kota Binjai didominasi oleh penduduk yang mempunyai pendidikan tertinggi SMA, yaitu sebesar 35,78 persen kemudian diikuti dengan Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) sebesar 18,30 persen. Kemudian penduduk yang pendidikan tertinggi Diploma I/II/III sebesar 2,53 persen, D IV/Universitas sebesar 12,53 persen, pendidikan tertinggi SMP sebesar 17,92 persen, dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 12,93 persen.

Grafik 6.2. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Pendidikan yang ditamatkan, 2022



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022



BAB 7
TARAF DAN POLA
KONSUMSI

<http://binjaya.ta.bps.go.id>

7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Binjai terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.309.349,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 652.008,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 657.341,-. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Binjai sudah tidak memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023

Daerah	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	674 724	57,08	507 393	42,92	1 182 117	100
Binjai	652 008	49,80	657 341	50,20	1 309 349	100

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga di daerah perdesaan di Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu sebesar 59,01 persen sedangkan untuk konsumsi makanan dan

perkotaan sebesar 40,99 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perdesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan relatif lebih baik dibanding di perdesaan.

Persentase pengeluaran untuk bukan makanan di wilayah kota relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Persentase tertinggi di Kota Medan (55,39 persen), diikuti Kota Binjai (50,20 persen) dan Kota Gunungsitoli (48,41 persen). Sedangkan persentase pengeluaran untuk bukan makanan terendah terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara (35,52 persen).

<https://binjaikota.bps.go.id>

Tabel 7.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pengeluaran/Kapita/Bulan Expenditure Class			% Pengeluaran/Kapita/Bulan Percentage of Expenditure		
	Makanan Food	Bukan Makanan Not Food	Jumlah Total	Makanan Food	Bukan Makanan Not Food	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
01 Nias	494 106	343 020	837 125	59,02	40,98	100,00
02 Mandailing Natal	663 244	380 600	1 043 844	63,54	36,46	100,00
03 Tapanuli Selatan	643 581	430 794	1 074 375	59,90	40,10	100,00
04 Tapanuli Tengah	572 571	375 507	948 078	60,39	39,61	100,00
05 Tapanuli Utara	736 165	405 465	1 141 630	64,48	35,52	100,00
06 Toba Samosir	841 075	548 860	1 389 936	60,51	39,49	100,00
07 Labuhanbatu	686 708	526 242	1 212 950	56,61	43,39	100,00
08 Asahan	682 695	523 214	1 205 909	56,61	43,39	100,00
09 Simalungun	758 906	543 703	1 302 609	58,26	41,74	100,00
10 Dairi	685 125	479 280	1 164 405	58,84	41,16	100,00
11 Karo	995 937	561 044	1 556 980	63,97	36,03	100,00
12 Deli Serdang	668 578	595 303	1 263 881	52,90	47,10	100,00
13 Langkat	654 858	473 619	1 128 476	58,03	41,97	100,00
14 Nias Selatan	451 598	282 772	734 370	61,49	38,51	100,00
15 Humbang Hasundutan	663 132	460 193	1 123 325	59,03	40,97	100,00
16 Pakpak Bharat	702 183	497 024	1 199 207	58,55	41,45	100,00
17 Samosir	760 075	492 033	1 252 109	60,70	39,30	100,00
18 Serdang Bedagai	642 834	469 344	1 112 178	57,80	42,20	100,00
19 Batu Bara	622 194	507 157	1 129 351	55,09	44,91	100,00
20 Padang Lawas Utara	708 666	473 828	1 182 495	59,93	40,07	100,00
21 Padang Lawas	677 609	462 952	1 140 561	59,41	40,59	100,00
22 Labuhan Batu Selatan	694 647	562 969	1 257 616	55,24	44,76	100,00
23 Labuhan Batu Utara	675 484	510 719	1 186 203	56,95	43,05	100,00
24 Nias Utara	485 149	304 001	789 150	61,48	38,52	100,00
25 Nias Barat	403 279	298 575	701 854	57,46	42,54	100,00
Kota/Municipality						
71 Sibolga	731 752	552 502	1 284 254	56,98	43,02	100,00
72 Tanjungbalai	726 156	487 277	1 213 433	59,84	40,16	100,00
73 Pematangsiantar	797 317	729 837	1 527 154	52,21	47,79	100,00
74 Tebing Tinggi	760 606	702 573	1 463 178	51,98	48,02	100,00
75 Medan	864 087	1 073 040	1 937 127	44,61	55,39	100,00
76 Binjai	652 008	657 341	1 309 349	49,80	50,20	100,00
77 Padangsidempuan	697 175	595 598	1 292 773	53,93	46,07	100,00
78 Gunungsitoli	466 403	437 575	903 979	51,59	48,41	100,00
SUMATERA UTARA	674 724	507 393	1 182 117	57,72	42,28	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023



BAB 8

PERUMAHAN

<https://kantorikota.bps.go.id>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

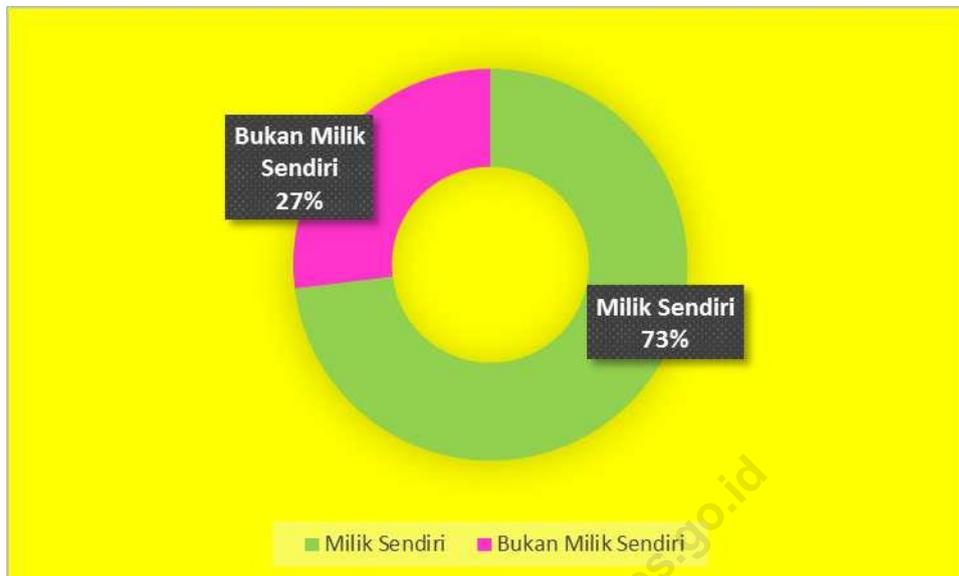
Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

8.1. Kondisi Rumah Tinggal

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan

rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator *backlog* perumahan.

Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Binjai, 2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Berdasarkan informasi pada Grafik 8.1, mayoritas rumah tangga di Binjai yakni mencapai sekitar dua per tiga (73 persen) mendiami rumah milik sendiri dan 27 persen mendiami rumah bukan milik sendiri yang terdiri dari kontrak/sewa, rumah bebas sewa dan rumah dinas. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mendiami rumah milik sendiri inilah yang sering digunakan sebagai acuan dalam target penyediaan rumah di Binjai maupun nasional.

Aspek pertama dalam menilai kualitas sebuah rumah adalah lantai. Lantai rumah yang luas dan jenisnya yang berkualitas lebih memungkinkan anggota rumah tangga untuk beraktivitas secara leluasa. Relevansinya dengan kesehatan, lantai menjadi sarana kontak anggota rumah tangga dengan kemungkinan berbagai penyakit. Bahkan jenis lantai ini merupakan salah satu variable dalam penentuan keluarga sejahtera atau pra sejahtera. Dengan demikian jenis dan luas lantai disamping menggambarkan keadaan social ekonomi juga amat vital dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah luas lantai per kapita yang merupakan rata-rata luas lantai yang ditempati tiap anggota rumah tangga.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat

adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak, serta ruang gerak lainnya. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8m².

Tabel. 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023

Luas Lantai (m ²)	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
<=19	1,45	0,60
20-49	32,01	28,40
50-99	50,64	50,55
100-149	11,05	12,58
>=150+	4,85	7,87

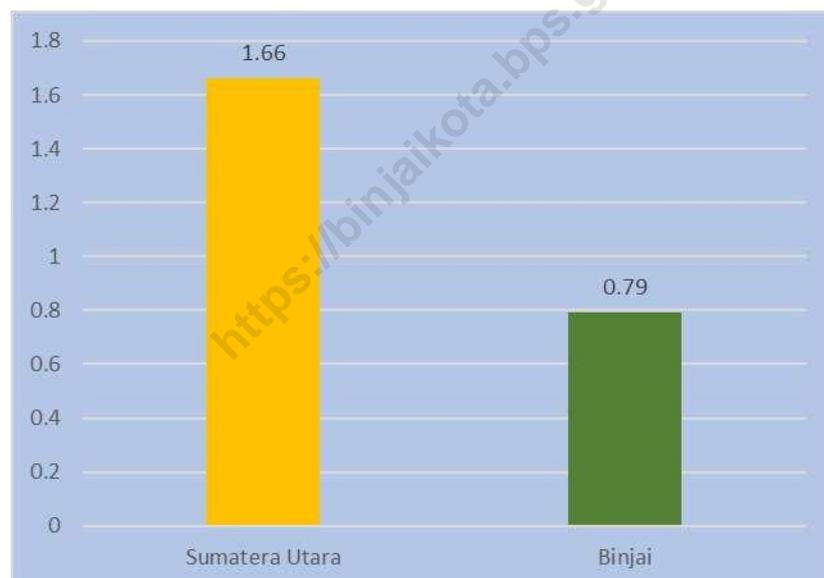
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Sumatera Utara menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2023 sebagian besar rumah di Binjai memiliki luas lantai pada kelompok 50-99 meter persegi yaitu sebesar 50,55 persen. Sama halnya dengan Kota

Binjai, sebagian besar rumah di Provinsi Sumatera Utara memiliki luas lantai pada kelompok 50-99 meter persegi yaitu sebesar 50,64 persen.

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada grafik 8.2. diketahui bahwa sekitar 0,79 persen rumah tangga di Kota Binjai masih tinggal di rumah dengan lantai tanah, walaupun kondisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 1,66 persen. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 2,77 persen rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.

Grafik 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lantai Terluas Terbuat dari Tanah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2023, sekitar 91,67 persen rumah tangga di Kota Binjai tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 4,96 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 99,68 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap seng, asbes, genteng, dan beton.

8.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2023 sebanyak 100 persen rumah tangga di Binjai menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN, sedangkan rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN sebesar 98,70 persen. Hal ini menandakan kondisi Kota Binjai lebih baik dibanding Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 8.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023

Uraian	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	98,70	100
Rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air sendiri (%)	88,72	96,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Selain itu, 96,36 persen rumah tangga di Kota Binjai memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara hanya 88,72 persen yang memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, sisanya adalah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air, menggunakan fasilitas umum, ataupun berbagi dengan rumah tangga lain.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023

Sumber Air Minum	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
1. Air kemasan/isi ulang	38,30	0,7
2. Ledeng	12,07	7,37
3. Sumur Bor/Pompa	22,99	59,57
4. Sumur terlindungi	10,38	32,23
5. Sumur tak terlindung	2,13	-
6. Mata Air terlindung/tak terlindungi	10,69	-
7. Air Permukaan	0,92	-
8. Air Hujan	2,31	-
9. Lainnya	0,22	0,76

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai menggunakan sumber utama untuk mandi/cuci/dll dari sumur bor/pompa yaitu mencapai 59,57 persen dan sumur terlindungi 32,23 persen. Di Provinsi Sumatera Utara, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber sumur bor/pompa (22,99 persen) lebih sedikit dibandingkan Kota Binjai, berbeda dengan penggunaan air ledeng dimana penggunaannya di Kota Binjai lebih sedikit (7,37 persen) dibanding Provinsi Sumatera Utara (12,07 persen). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air dari air kemasan/isi ulang, untuk Kota Binjai lebih sedikit yaitu sebesar 0,7 persen daripada Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 38,30 persen.

Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Kota Binjai yaitu sebesar 97,57 persen, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara lebih rendah yaitu sebesar 88,65 persen.

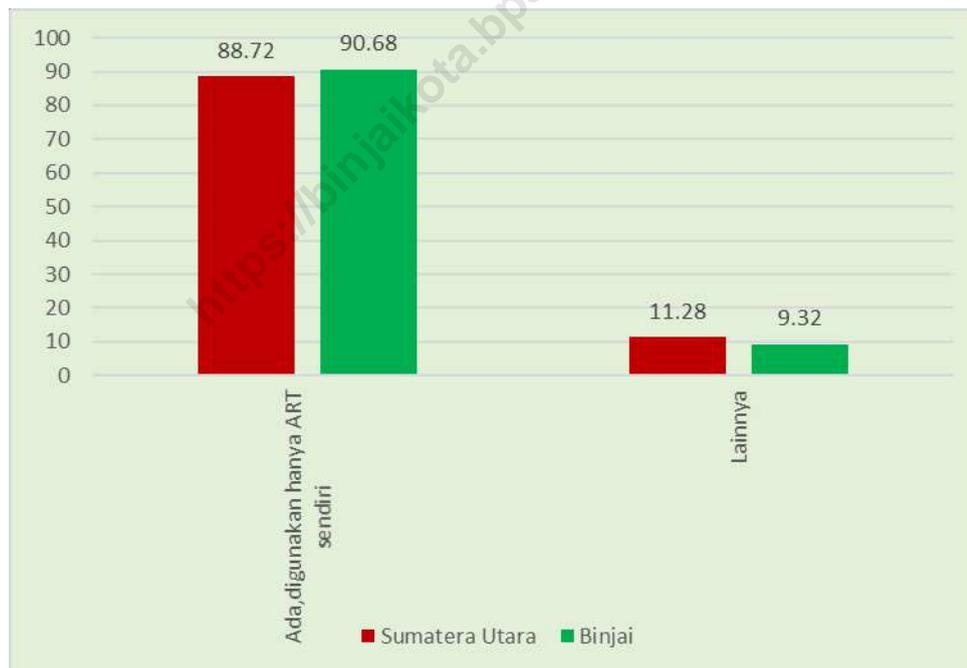
Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023

Tempat Penampungan Kotoran/tinja	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
1. Tangki Septik/SPAL	88,65	97,57
2. Lainnya	11,35	2,43
J u m l a h	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di Binjai sudah mempunyai fasilitas sendiri (90,68 persen). Di Sumatera Utara, rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri jauh lebih kecil (88,72 persen) dibandingkan Kota Binjai.

Grafik 8.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023



BAB 9

KEMISKINAN

<https://id.kemiskinan.bps.go.id>

9.1. Perkembangan Penduduk Miskin

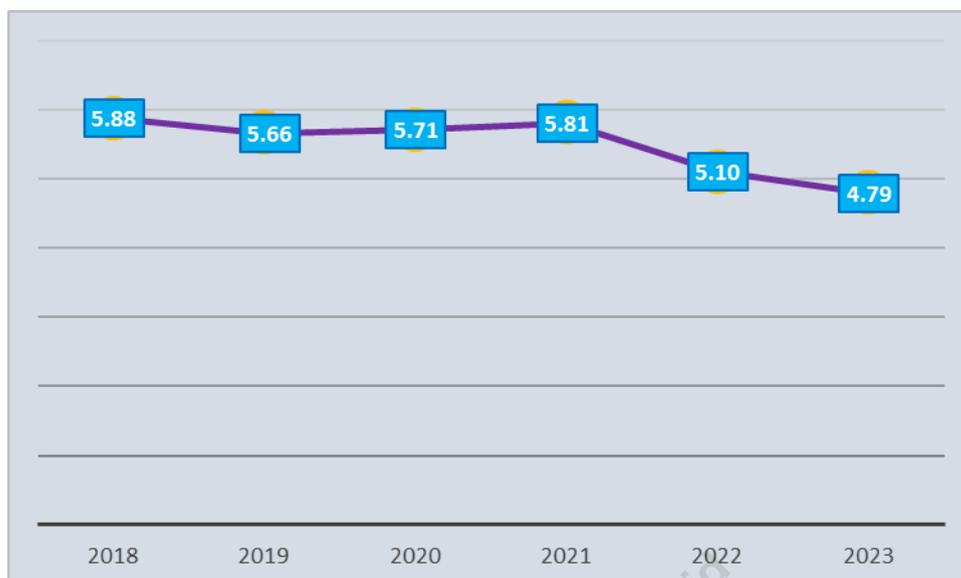
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimal non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Binjai beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Binjai sekitar 5,88 persen. Angka ini kemudian menurun menjadi 5,66 persen pada tahun 2019, meningkat pada tahun 2020 menjadi 5,71 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 5,81, pada tahun 2022 menurun menjadi 5,10 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 4,79 persen.

Grafik 9.1. Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai, 2018-2023



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2023

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada Tabel 9.1. Pada tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Binjai adalah 0,48 dan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,06.

Tabel 9.1. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Kota Binjai, 2023

Indeks	Binjai
(1)	(2)
Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)	0,48
Indeks keparahan kemiskinan (P_2)	0,06

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

Jalan WR. Mongonsidi No.22 Binjai 20714

Telp. (061) 8826571, Fax (061) 8821146

Homepage: <http://www.binjaikota.bps.go.id>, email: bps1276@bps.go.id